



**PEMERINTAH
KOTA CIMAHI
DINAS KESEHATAN**



LKIP



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH**

2022

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan selama Tahun 2022 dan sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Hasil Evaluasi LKIP Dinas Kesehatan Kota Cimahi yang ditetapkan oleh inspektorat pada tahun 2022 yaitu 79,03 dengan kategori BB, mengalami peningkatan bila dibandingkan tahun 2021 yaitu 78,60

Berdasarkan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Dinas Kesehatan mendukung Misi 1 Kota Cimahi yaitu **Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul.** Sasaran strategis Dinas Kesehatan adalah Meningkatnya Derajat Kesehatan dengan indikator tujuan Indeks Kesehatan, yang dijabarkan dengan dua indikator sasaran/indikator Kinerja yaitu Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH, Rasio Kematian Bayi per 1.000 KH.

Indeks Kesehatan tahun 2022 adalah 83,85 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,12. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2022 sebesar 100,88% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2022 menunjukkan capaian kinerja yang sangat tinggi. 92,47% untuk indikator kinerja Ratio Kematian Ibu per 100.000 KH dan 116,62% untuk indikator Ratio Kematian bayi per 1000 KH.

Capaian kinerja keuangan berdasarkan Anggaran Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 151.020.796.331,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 122.846.723.245,- (81,34 %).

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 dapat diselesaikan.

Laporan kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kota Cimahi selama Tahun 2022, sebagai pengukuran kinerja dan evaluasi serta hasil analisis terhadap pencapaian target dalam indikator kinerja Perangkat Daerah.

Dalam penyajian laporan ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat diharapkan untuk perbaikan dimasa yang akan datang. Ucapan terima kasih dan penghargaan Kami sampaikan atas bantuan dan kerja sama berbagai pihak dalam penyusunan laporan kinerja ini.

Cimahi, Februari 2023

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAH,**



Dr. MULYATI, S.Kep., Ners., M.Kes
NIP. 196905161995032002

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Gambaran Umum Perangkat Daerah.....	3
D. Sumber Daya Manusia	7
E. Sarana Kesehatan.....	11
F. Identifikasi Permasalahan	12
G. Sistematika Penyajian.....	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
A. Rencana Strategis	17
1. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD.....	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	20
A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci	22
B. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja ..	25
C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	30
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Jumlah Ketenagaan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan.....	8
Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Jabatan.....	9
Tabel 3 Jumlah PNS Dinas Kesehatan Kota Cimahi Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	9
Tabel 4. Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan)	10
Tabel 5. Tabel Sarana Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022.....	11
Tabel 6. Keterkaitan RPJMD Kota Cimahi dengan Renstra.....	17
Tabel 7. Matrik Rencana Strategis Perubahan	18
Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022.....	19
Tabel 9. Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	20
Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 11. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022	22
Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama	23
Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2022.....	24
Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan.....	25
Tabel 15. Realisasi Anggaran sasaran strategis Dinkes Tahun 2022	30
Tabel 16. Capaian Kegiatan Capaian Kinerja Kegiatan.....	31

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	4
Gambar 2. Rasio Kematian Ibu dan Kematian Bayi	26
Gambar 3. Penyebab Kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2022	27
Gambar 4. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi Tahun 2021	29

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : SK IKU Dinas Kesehatan Tahun 2022
- Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Murni Dinas Kesehatan Tahun 2022
- Lampiran 3 : Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Kesehatan Tahun 2022
- Lampiran 4 : Tabel Monev Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2022
- Lampiran 5 : SK Tim Penyusun LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2022

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama Tahun 2022, disamping merupakan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Proses penyusunan Laporan Kinerja dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah. Laporan Kinerja sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan visi dan misi untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, Indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH, Rasio Kematian Bayi per 1.000 KH.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi No 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota

Cimahi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2011 nomor 134);

8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 630 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

C. Gambaran Umum Perangkat Daerah

1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan, Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan Pemerintahan di bidang kesehatan;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kesehatan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

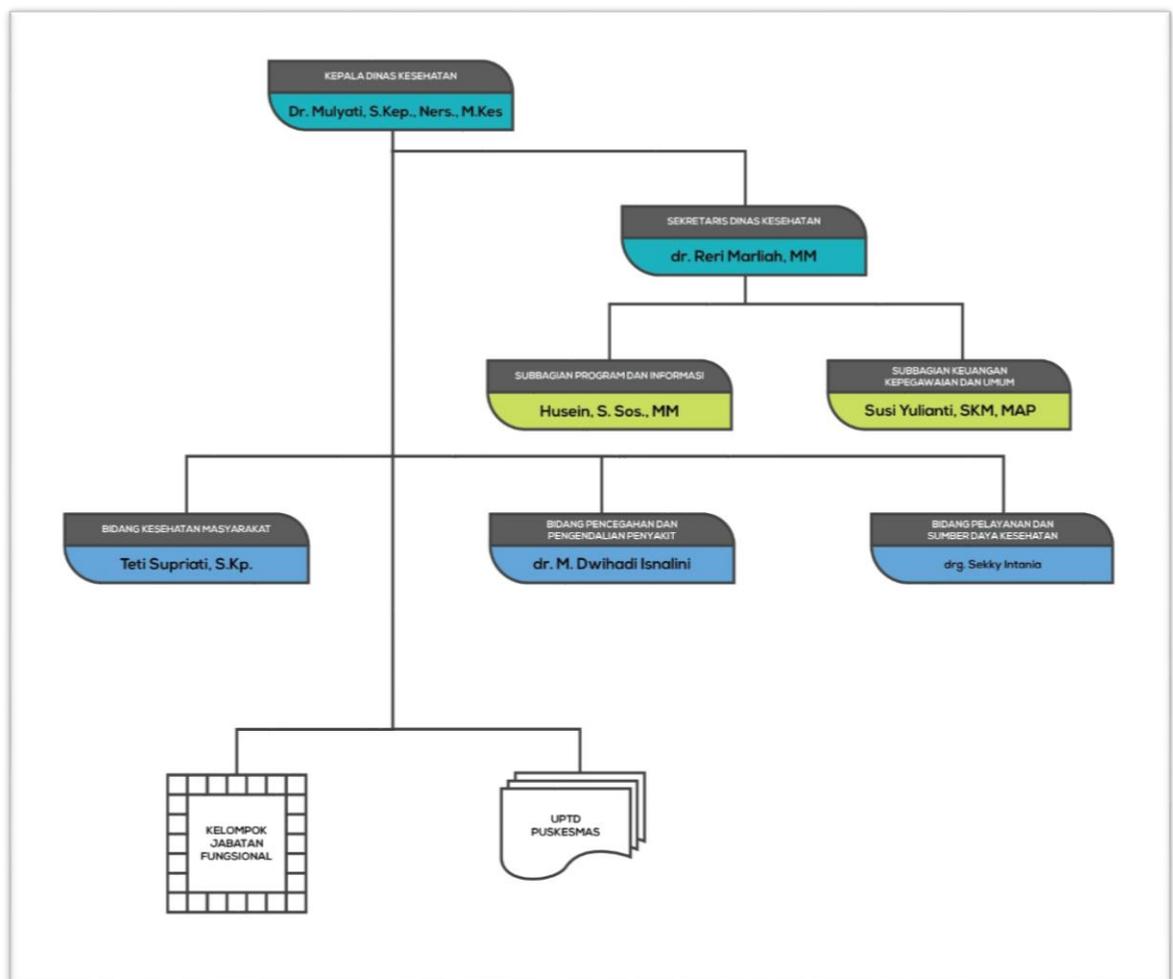
2. Susunan dan Bagan Struktur Organisasi

Untuk menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana disebutkan diatas, Dinas Kesehatan Kota Cimahi memiliki susunan organisasi sebagai berikut :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum;
 - Sub Bagian Program dan Informasi.
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
- e. Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
- f. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Daerah
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Berikut Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Gambar 1. Struktur Organisasi Dinas Kesehatan



Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Sekretaris

Tugas Pokok dari sekretaris yaitu memimpin, merencanakan, mengatur, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan operasional administrasi program dan informasi dan operasional administrasi keuangan, kepegawaian dan umum.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- b. Pengelolaan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- c. Pengoordinasian urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Program dan Informasi dan urusan Program Keuangan, Kepegawaian dan Umum.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

Tugas Pokok yaitu Merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kesehatan masyarakat dan pengendalian teknis kesehatan masyarakat.

Fungsi :

- a. Perencanaan operasional kegiatan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- b. Pengelolaan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.
- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Kesehatan Keluarga dan Gizi, Promosi dan Pemberdayaan Kesehatan dan Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olah Raga.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan pengendalian teknis kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

Fungsi :

a. Perencanaan operasional kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

b. Pengelolaan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pengamatan Penyakit dan Imunisasi; Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan

Tugas Pokok yaitu merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan perencanaan teknis Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan; dan pengendalian teknis Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

Fungsi :

a. Perencanaan operasional bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan.

b. Pengelolaan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia

Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.

- c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan, Kefarmasian dan Alat Kesehatan dan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Mutu Pelayanan dan Sarana Prasarana Kesehatan.
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas

UPTD pada Dinas Kesehatan adalah Puskesmas, UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta mempunyai tugas pokok meliputi upaya pengobatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, penyehatan lingkungan, perbaikan gizi, pelayanan kesehatan ibu dan anak, melaksanakan ketatausahaan puskesmas.

Fungsi :

- a. Perencanaan kegiatan pelayanan masyarakat
- b. Pelaksanaan Pembinaan Teknis Dan Pengawasan Mutu, Pelayanan Kepada sarana pelayanan dasar swasta dan Puskesmas
- c. Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi Dan Pelaporan Kepada Dinas Kesehatan.

D. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai pada Dinas Kesehatan pada tahun 2022 adalah 498 orang, yang terdiri dari 383 orang PNS, 5 orang Bidan PTT, 15 orang Bidan Harian Lepas (BHL) dan 95 orang Tenaga Harian Lepas (THL)/Kontrak tersebar di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kota Cimahi.

Berikut tabel ketenagaan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 :

Tabel 1. Jumlah Ketenagaan berdasarkan Kualifikasi Pendidikan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022

NO	JENIS TENAGA	2022
1	S3	1
2	S2	17
3	Dokter Umum	46
4	Dokter Gigi	18
5	Dokter Spesialis	0
6	Sarjana Kesehatan Masyarakat	38
7	Apoteker	11
8	Sarjana Lain	8
9	Sarjana Keperawatan	2
10	Sarjana Sosial	8
11	Sarjana Gizi (D4 Gizi)	4
12	D3 Keperawatan	63
13	D3 Gizi	8
14	D3 Analisis Kesehatan	16
15	D3 Kesehatan Lingkungan	9
16	D3 Kebidanan	45
17	D3 Kesehatan Gigi	15
18	Akademi Lainnya	15
19	D3 Rekam Medik	12
20	SMA sederajat	15
21	Kontrak/Honorer/Tenaga Harian Lepas	95
22	Bidan Harian Lepas	15
23	Bidan PTT	5
24	Sarjana Farmasi	4
25	D4 Kebidanan	3
26	D4 Analisis Kesehatan	1
27	D4 Kesehatan Lingkungan	3
28	D4 Kesehatan Gigi	0
29	D3 Farmasi	21
	JUMLAH	498

1. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Jabatan

Jumlah PNS Dinas Kesehatan Kota Cimahi pada tahun 2022, sebanyak 383 orang. Adapun jumlah PNS menurut Pangkat dan Golongan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2 Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022

No	Golongan Jabatan	Jumlah	Presentase
1	Golongan IV	42	10,97%
2	Golongan III	273	71,28%
3	Golongan II	68	17,75%
4	Golongan I	0	0%
	JUMLAH	383	100%

Berdasarkan Tabel di atas terlihat bahwa Jumlah PNS menurut golongan jabatan, jumlah paling sedikit terdapat pada pegawai golongan IV sebesar 10,97 % dan jumlah terbanyak terdapat pada pegawai golongan III sebesar 71,28 %. Sementara pegawai golongan II sebesar 17,75 %. Perlu dipertimbangkan pengembangan sumber daya aparatur dari sisi peningkatan golongan jabatan pegawai, khususnya pegawai golongan II, sehingga dengan peningkatan tersebut diharapkan kapasitas pegawai juga akan meningkat. Jumlah pegawai golongan III yang cukup besar juga perlu diarahkan untuk meningkatkan golongannya.

2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Jumlah PNS Dinas Kesehatan menurut tingkat pendidikan sebagai berikut :

Tabel 3 Jumlah PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022 Pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi

No	Golongan Jabatan	Jumlah	Perentase
1	Strata 3/ Strata 2	21	5,48%
2	Strata 1/ Diploma IV	146	38,12%
3	Diploma III	201	52,48%
4	SLTA sederajat	15	3,92%
	JUMLAH	383	100%

Berdasarkan Tabel, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan Diploma adalah jumlah terbanyak yaitu sebesar 52,48%, jumlah PNS dengan tingkat pendidikan Sarjana/Diploma IV sebesar 38,12%, tingkat pendidikan S3/S2 sebesar 5,48%. Sementara PNS yang paling sedikit dengan tingkat pendidikan SLTA sederajat sebesar 3,92%. Dari sisi tingkat pendidikan sudah cukup baik, namun perlu ditingkatkan ke jenjang S1, S2 ataupun S3 untuk pengembangan kapasitas sumber daya aparatur.

3. Jumlah Ketenagaan Di Puskesmas

Ketenagaan di Puskesmas diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Gambaran ketersediaan Ketenagaan sebagai berikut :

Tabel 4. Ketenagaan (Puskesmas Kawasan Perkotaan) di Kota Cimahi Tahun 2022

No	Jenis Tenaga	Standar Permenkes No.43 Th 2019 /Puskesmas	Standar Ketenagaan di 13 Puskesmas	Ketenagaan di 13 Puskesmas	Kesenjangan (+/-)
Tenaga Kesehatan					
1	Dokter dan/atau dokter layanan primer	1	13	46	33
2	Dokter gigi	1	13	17	4
3	Perawat	5	65	71	6
4	Bidan	4	52	74	22
5	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	2	26	25	-1
6	Tenaga Sanitasi Lingkungan	1	13	20	7
7	Nutrisionis	1	13	26	13
8	Tenaga Apoteker dan/atau Tenaga Teknis Kefarmasian	1	13	34	21
9	Ahli Teknologi Laboratorium Medik	1	13	19	6
Tenaga Non Kesehatan					
10	Tenaga Sistem Informasi Kesehatan	1	13	28	15
11	Tenaga Administrasi Keuangan	1	13	46	33
12	Tenaga Ketausahaan	1	13	11	-2
13	Pekarya	2	26	13	-13

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahawa ketenagaan di Puskesmas secara keseluruhan sudah memadai untuk beberapa

jenis tenaga, namun masih terdapat kesenjangan tenaga kesehatan pada beberapa ketenagaan yaitu tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (-1), sedangkan untuk tenaga non kesehatan kesenjangan terdapat pada tenaga ketatausahaan (-2), pekarya (-13) orang.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kekurangan kebutuhan tenaga kesehatan dan non kesehatan di puskesmas dalam jangka pendek adalah melakukan rekrutmen tenaga kontrak melalui kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) yang bersumber anggaran dari DAK Non Fisik, sedangkan untuk jangka panjang adalah menyampaikan usulan kebutuhan atau formasi tenaga kesehatan dan non kesehatan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BKPSDMD) Kota Cimahi.

E. Sarana Kesehatan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyatakan fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Jumlah sarana Kesehatan di Kota Cimahi sebagaimana terlihat pada tabel berikut :

Tabel 5. Tabel Sarana Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
A	Rumah Sakit	
1	Rumah Sakit Umum	7
2	Rumah Sakit Khusus (RSGMP Unjani)	1
B	Puskesmas	
1	Puskesmas PONE	3
3	Puskesmas Rawat Inap	1
3	Puskesmas Non Rawat Inap	12
4	Puskesmas Pembantu	2
C	Sarana Pelayanan Kesehatan Lain	
1	Laboratorium Kesehatan	6

No	Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah
2	Klinik Utama	9
3	Klinik Pratama	41
4	Praktek Dokter umum perorangan	132
5	Praktek Dokter gigi perorangan	57
6	Praktek Dokter Spesialis perorangan	40

F. Identifikasi Permasalahan

Dalam pelaksanaan rencana kerja 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, menghadapi beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

1. Belum optimalnya penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang akuntabel

Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah salah satunya diukur dengan penilaian akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penyelenggaraan sistem akuntabilitas pada Dinas Kesehatan Kota Cimahi masih memerlukan pengelolaan yang sistematis, antara tujuan, sasaran, program dan kegiatan agar lebih optimal.

2. Belum optimalnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Rasio Kematain Ibu dan rasio kematian Kota Cimahi Tahun 2017-2022 bergerak fluktuatif. Rasio kematian ibu menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2021 dengan 196,08 per 100.000 kelahiran hidup, sementara Rasio kematian bayi menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2017 yaitu 7,14 per 1000 Kelahiran Hidup.

Rasio Kematian Ibu di Kota Cimahi pada tahun 2022 sebesar 123,88/100.000 Kelahiran Hidup (13 kasus), dan Rasio Kematian Bayi sebesar 5,34/1000 Kelahiran Hidup (56 kasus). Rasio kematian ibu dan Rasio kematian bayi kota Cimahi masih dibawah target Nasional berdasarkan Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang menetapkan target Rasio

Kematian ibu sebesar 205/100.000 KH dan target rasio kematian bayi sebesar 18,6/1000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2022.

3. Kejadian stunting

Angka Stunting pada balita di Kota Cimahi tahun 2022 sebesar 9,7% menurun sebesar 0,68% dibandingkan tahun 2021 yaitu 10,38%. Angka ini masih dibawah prevalensi nasional berdasarkan Riskesdas tahun 2018 sebesar 31,1%. Walaupun demikian stunting perlu menjadi perhatian, karena Stunting yang telah terjadi bila tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan menurunnya pertumbuhan, lemahnya kognitif dan psikomotorik terhambat, lebih mudah terkena penyakit degeneratif, dan menurunkan kualitas sumber daya manusia.

4. Belum Tercapainya Target SPM Bidang Kesehatan.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018. Permendagri nomor 59 tahun 2021. Selanjutnya Standar Teknis Pemenuhan SPM diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan terdapat 12 (dua belas) jenis layanan dasar.

Realisasi capaian SPM Bidang Kesehatan tahun 2022 sebagai berikut: Pelayanan kesehatan ibu hamil 98,70%, Pelayanan kesehatan ibu bersalin 99,15%, Pelayanan kesehatan bayi baru lahir 98,45%, Pelayanan kesehatan balita 100%, Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar 100%, Pelayanan kesehatan pada usia produktif 99,49%, Pelayanan kesehatan pada usia lanjut 100%, Pelayanan kesehatan penderita hipertensi 100%, Pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus 100%, Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100%, Pelayanan kesehatan orang terduga

TB 100%, Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*HIV*) 100%.

Standar Pelayanan Minimal bidang kesehatan perlu mendapat perhatian khusus. Pencapaian target-target SPM menjadi indikator penilaian kinerja Kepala Daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada Warga Negara. Perlu Pemetaan kondisi awal SPM dan kemampuan daerah terkait penetapan target pencapaian sasaran SPM pada tahun berjalan dan tahun berikutnya. Perhitungan rencana pembiayaan kegiatan mendukung SPM dan mengintegrasikan SPM tersebut ke dalam dokumen perencanaan. Selain itu dibutuhkan Dukungan dari pemegang kebijakan dan keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai pihak, seperti rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta, fasilitas pelayanan kesehatan baik tingkat pertama maupun rujukan, institusi pendidikan dan kesehatan, Dokter praktek swasta, Bidan Praktek Mandiri, kader kesehatan serta masyarakat.

3. Pembiayaan Kesehatan

Pembiayaan JKN di Indonesia diperlukan untuk menjamin akses pada upaya Kesehatan. Capaian UHC Kota Cimahi sebesar 99,83% atau sebanyak 555.446 jiwa.

Cakupan kesehatan semesta (*Universal Health Coverage/UHC*) adalah kombinasi antara kecukupan fasyankes dan cakupan kepesertaan JKN. Cakupan kesehatan semesta menjamin seluruh masyarakat mempunyai akses untuk kebutuhan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang berkualitas dan efektif. Cakupan kesehatan semesta dinyatakan telah tercapai bila seluruh penduduk sudah memiliki akses terhadap layanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu, baik upaya promotif, preventif, deteksi dini, pengobatan, rehabilitatif. Kecukupan dan akses masyarakat terhadap Fasyankes perlu menjadi perhatian.

4. Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Penyakit menular yang perlu menjadi perhatian khusus adalah tuberkulosis, HIV/AIDS dan malaria, selain penyakit yang

dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Jumlah kasus Tuberkulosis dengan BTA terkonfirmasi positif pada tahun 2022 sebanyak 699 kasus, dengan total kasus 1741. Kasus kumulatif HIV pada tahun 2022 sebanyak 230 kasus dengan 20 kasus baru. Kasus malaria tahun 2022 sebanyak 43 kasus. Pengendalian faktor risiko utama untuk menurunkan beban penyakit menular harus dipantau melalui pengawasan atau surveilans yang efektif secara rutin dan terkoordinasi.

Pola hidup yang tidak sehat meningkatkan faktor risiko penyakit seperti obesitas, merokok, dan tekanan darah tinggi, sehingga mendorong meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) seperti stroke, jantung dan diabetes. Untuk menanggulangi masalah PTM perlu peningkatan upaya promotif dan preventif melalui pembudayaan GERMAS, pemberdayaan masyarakat dalam pengendalian faktor risiko PTM, dan peningkatan aksi multisektoral.

5. Pemberdayaan masyarakat dan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan pengetahuan, kesadaran dan kemampuan individu, keluarga serta masyarakat untuk berperan aktif dalam upaya kesehatan yang dilaksanakan dengan cara fasilitasi proses pemecahan masalah melalui pendekatan edukatif dan partisipatif serta memperhatikan kebutuhan, potensi dan sosial budaya setempat.

Cakupan Rumah Tangga ber PHBS 53,4% 62.632 dari 117.276 sasaran, masih dibawah target yang ditetapkan provinsi yaitu 60%. Permasalahan dalam penerapan RT ber PHBS adalah pada indikator tidak merokok di dalam rumah. Perlu meningkatkan kampanye GERMAS serta meningkatkan advokasi dan pembinaan dalam pelaksanaan kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR).

G. Sistematika Penyajian

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi

selama tahun 2022, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang, landasan hukum, tugas dan fungsi, permasalahan utama serta sistematika.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kota Cimahi visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis, program utama dan kegiatan, serta penetapan dan rencana kinerja.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini dijelaskan tentang pengukuran pencapaian kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja serta realisasi anggaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2022
2. Membandingkan antara realisasi dan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya
3. Membandingkan antara realisasi kinerja dengan target Renstra
4. Menganalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja
5. Menganalisis efisiensi penggunaan sumber daya

BAB IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan rekomendasi serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022 disusun sebagai acuan pelaksanaan program/kegiatan dan tolok ukur Penilaian Kinerja Pembangunan Kesehatan di Kota Cimahi Tahun 2021-2022, dan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan yaitu rencana kerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi.

Berdasarkan tugas dan fungsinya, maka Dinas Kesehatan berperan dalam mensukseskan pencapaian misi Kepala daerah terutama pada misi **pertama**, yaitu **“Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat dan Unggul”**. Untuk mewujudkan visi dan misi Wali Kota dalam melakukan upaya pembangunan kesehatan masyarakat dengan tujuan **”Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat”**, Dinas menjabarkan ke dalam IKU Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH dan Rasio Kematian Bayi per 1000 KH.

1. Keterkaitan Renstra Dinas Kesehatan dengan RPJMD

Perencanaan strategis Dinas kesehatan Kota Cimahi yang tertuang pada dokumen Renstra Perubahan Dinas Kota Cimahi tahun 2017-2022 memiliki keterkaitan dengan Perubahan RPJMD Kota Cimahi tahun 2017-2022, keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Keterkaitan RPJMD Kota Cimahi dengan Renstra Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Misi RPJMD	Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Tujuan Renstra Dinkes	Indikator Sasaran/ IKU Renstra Dinkes
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul.	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH
				Rasio Kematian Bayi per 1000 KH

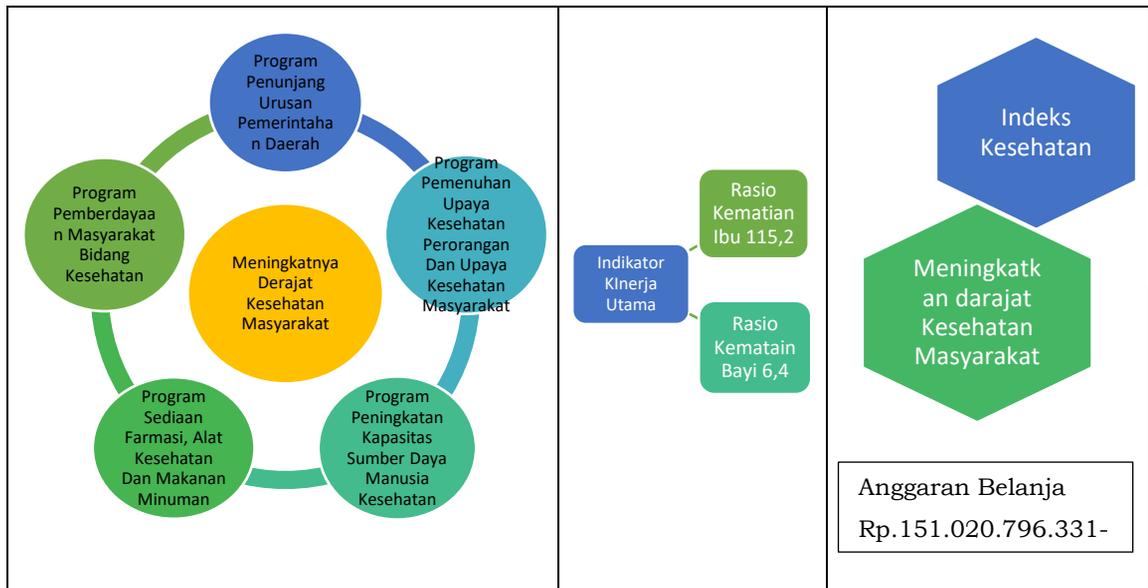
2. Matriks Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2017-2022

Berdasarkan dokumen Renstra Perubahan Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022, indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi yaitu Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH, Rasio Kematian Bayi per 1000 KH. Indikator tujuan dan indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 7. Matrik Rencana Strategis Perubahan
Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2017-2022**

NO	INDIKATOR TUJUAN	INDIKATOR SASARAN/ IKU	KONDISI AWAL 2017	TARGET TAHUNAN				
				2018	2019	2020	2021	2022
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul								
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat								
Sasaran Strategis : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat								
Indeks Kesehatan			82.38	80.47	82.49	82.51		
						83.12 (kondisi Awal)	82.94	83.12
1	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH		113.98	102	101.5	101		
2	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH		7.14	7.12	7.10	7		
3	IndeksKeluarga Sehat (IKS)		NA	0.4	0.405	0.41		
1	Ratio Kematian Ibu/100.000 KH						115.5	115.2
2	Ratio Kematian Bayi/1.000 KH						6.5	6.4

Dalam mewujudkan sasaran strategis meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan mencapai indikator sasaran, Dinas Kesehatan ditunjang oleh 5 program yang saling berkaitan dengan masing-masing indikator sasaran. Keterkaitan antara program yang mendukung capaian IKU dinas kesehatan dan indikator kinerja kepala daerah dapat dilihat pada gambar berikut :



B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan berisi sasaran strategis, Indikator sasaran dan Target yang akan dicapai dalam tahun 2022. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu	Per 100.000 KH	115,2
		Rasio Kematian Bayi	Per 1000 KH	6,2

Sementara anggaran belanja dalam perjanjian kinerja tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 9. Anggaran Belanja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2022

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	82.742.047036
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	66.131.813.395
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.145.574.200
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	69.629.000
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.905.500
	TOTAL	152.289.996.331

Anggaran pada dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan, merupakan anggaran perubahan yang ditetapkan melalui Perwal Nomor 35 Tahun 2022, selanjutnya pada bulan Desember tahun 2022 Terjadi pengurangan anggaran pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, sub kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat menjadi 41.013.122.900,- Rupiah. Sehingga Jumlah Anggaran yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 Sebesar 151.020.796.331,- Rupiah, yang ditetapkan dengan Perwal Nomor 47 Tahun 2022,

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Alat ukur yang digunakan untuk ukuran keberhasilan atau kegagalan capaian kinerja adalah Indikator Kinerja Utama (IKU).

Kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi pemerintah menggunakan skala nilai peringkat kinerja yang dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Adapun skala yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Kinerja
1	91 % ≤ 100%	Sangat Tinggi
2	76% ≤ 90%	Tinggi
3	66 % ≤ 75%	Sedang
4	51 % ≤ 65 %	Rendah
5	≤ 50 %	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri 86 Tahun 2017

Nilai realisasi kinerja dilakukan dengan membandingkan antara rencana (target) dan realisasi sebagai berikut :

- a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin baik pencapaian maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja maka digunakan rumus sbb:

$$\text{Persentase capaian} = \text{Target} - \frac{\text{Realisasi} - \text{Target}}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. Capaian Kinerja Indikator Kinerja Kunci

Pengukuran target kinerja dari tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

1. Hasil Capaian Kinerja Tahun 2022 dibandingkan Target.

Indeks Kesehatan tahun 2022 adalah 83,85 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,12. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2022 sebesar 100,88% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2022 adalah 74,21.

Capaian indikator sasaran Dinas Kesehatan Kota Cimahi tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11. Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET 2022	REALISASI 2022	CAPAIAN KINERJA	KRITERIA PENILAIAN
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul						
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat						
1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	115,2	123,88	92,47%	Sangat Tinggi
		Rasio Kematian Bayi/1000 KH	6,4	5,34	116,6%	Sangat Tinggi

Capaian indikator sasaran/indikator kinerja utama Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi di tahun 2022 untuk Indikator Kinerja Sasaran Dinas Kesehatan Rasio Kematian Ibu per 100.000 KH belum memenuhi target yang telah ditetapkan 92,47%, sementara capaian

untuk Rasio Kematian Bayi per 1000 KH 116,62% telah mencapai target. Kedua indikator tersebut menunjukkan kriteria penilaian sangat tinggi.

2. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja Tahun 2022 terhadap Capaian Tahun sebelumnya

Capaian Kinerja Dinas Kesehatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2021-2022

No	Indikator Kinerja	2021				2022			
		Target	Realisasi	Capaian %	Penilaian	Target	Realisasi	Capaian %	Penilaian
1	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	115,5	196,08	30,24	Sangat Rendah	115,2	123,88	92,47	Sangat Tinggi
2	Rasio Kematian Bayi/1000 KH	6,5	7,06	91,40	Sangat Tinggi	6,4	5,34	116,62	Sangat Tinggi

Berdasarkan tabel terlihat capaian indikator kinerja Rasio Kematian Ibu/100.000 KH tahun 2022 sebesar 92,47% mengalami peningkatan kinerja sebesar 62,23% dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 30,24%. Capaian indikator kinerja Rasio Kematian Bayi/1000 KH tahun 2022 adalah 116,62% mengalami peningkatan kinerja sebesar 25,22% dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 91,40%.

3. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target RPJMD

Kinerja tahun anggaran tahun 2022 merupakan Target kinerja tahun terakhir pada dokumen Perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan Dinas Kesehatan tahun 2017-2022. Perbandingan capaian kinerja tahun 2022 terhadap target RPJMD dan renstra dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 13. Perbandingan Capaian IKU Dinas Kesehatan Tahun 2022 terhadap Target Perubahan RPJMD dan Renstra Perubahan tahun 2017-2022

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/IKU	Realisasi	Capaian Kinerja %	Target Akhir Renstra (2022)	Capaian RPJMD %
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkepribadian, berakhlak mulia, cerdas, sehat dan unggul					
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat					
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	123,88	92,47	115.2	92,47
	Rasio Kematian Bayi/1000 KH	5,34	116,62	6.4	116,62

Dari tabel perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 terhadap target akhir Renstra perubahan 2017-2022 dapat dijelaskan sebagai berikut, realisasi indikator Rasio Kematian Ibu/100.000 KH pada tahun 2022 sebesar 123,88/100.000 KH dengan capaian sebesar 92,47% terhadap target diakhir tahun Renstra 2022. Realisasi indikator angka kematian bayi pada tahun 2022 sebesar 5,34/1000 KH dengan capaian sebesar 116,62% diakhir tahun Renstra 2022.

4. Perbandingan Hasil Capaian Kinerja terhadap Target Nasional

Acuan Nasional yang digunakan sebagai perbandingan capaian kinerja khususnya untuk indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) sesuai Keputusan Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Nomor HK.02.02/I/836/2020 tentang Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024.

Perbandingan capaian kinerja Dinas Kesehatan tahun 2022 terhadap target Nasional dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 terhadap target Nasional

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran/ IKU	Realisasi	Target Nasional Tahun 2022	Interpretasi
Sasaran Strategis: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat				
Tujuan : Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat				
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Rasio Kematian Ibu/100.000 KH	123,88	205/100.000KH	Tercapai
	Rasio Kematian Bayi/1000 KH	5,34	18,6/1000 KH	Tercapai

Berdasarkan tabel perbandingan capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Tahun 2022 terhadap target Nasional terlihat bahwa Indikator Rasio Kematian Ibu dan Rasio Kematian Bayi telah tercapai. Capaian indikator Rasio Kematian Ibu/100.000 KH Kota Cimahi tahun 2022 adalah 123,88/100.000KH masih dibawah target Nasional yaitu 205/100.000 KH. Capaian indikator Rasio Kematian Bayi/1000 KH Kota Cimahi tahun 2022 adalah 5,34/1000 KH, kondisi ini masih dibawah target Nasional yaitu 18,6/1000 KH.

B. Evaluasi dan Analisis Keberhasilan/kegagalan Capaian Kinerja

a. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan tahun 2022 adalah 83,85 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,12. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2022 sebesar 100,88% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup).

Indeks Kesehatan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, hal ini menggambarkan bahwa adanya perbaikan pada pembangunan kesehatan di Kota Cimahi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2022 adalah 74,21. Angka harapan hidup adalah sebuah data statistik yang menggambarkan rata-rata lama waktu hidup seseorang dalam suatu populasi. Semakin tinggi angka harapan suatu wilayah

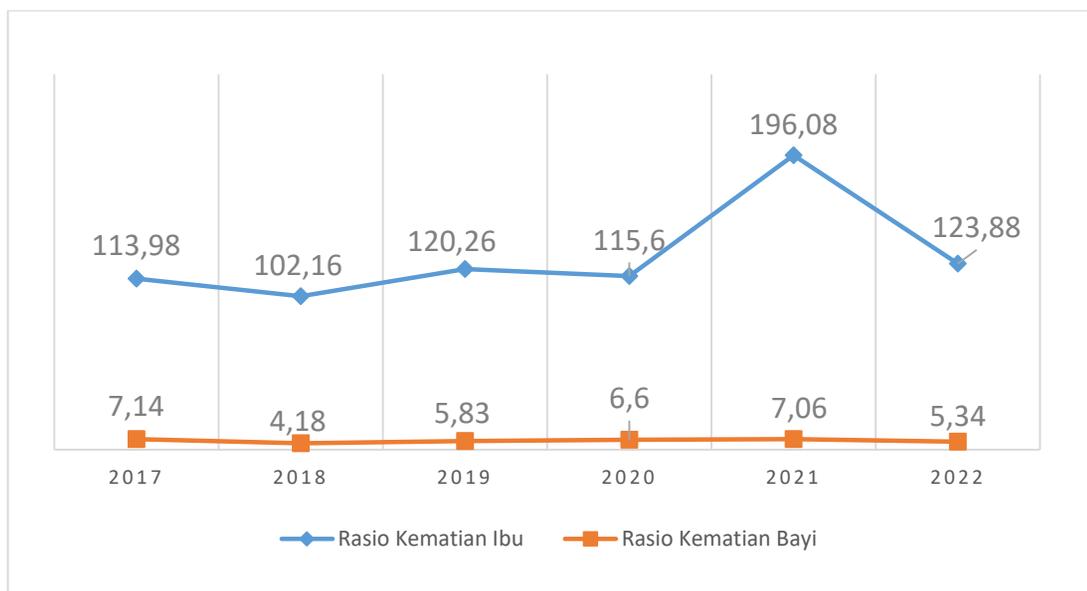
maupun negara, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di dalamnya.

Keberhasilan peningkatan Indeks Kesehatan Kota Cimahi dapat disebabkan faktor-faktor sebagai berikut :

- Ketersediaan Rumah Sakit di Kota Cimahi : 7 Rumah Sakit umum dan 1 Rumah Sakit Khusus dalam mendukung pelayanan
- Ketersediaan 13 Puskesmas di Kota Cimahi sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat (3 Puskesmas PONED, 10 Puskesmas non perawatan dan 2 Puskesmas Pembantu)
- Ketersediaan klinik
- Ketersediaan Tenaga Kesehatan
- Adanya Upaya Kesehatan berbasis Masyarakat (Posbindu, Posyandu, Pos UKK)
- Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan

b. Indikator Rasio Kematian Ibu dan kematian Bayi

Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi merupakan salah satu indikator derajat kesehatan. Tren Angka Kematian Ibu maupun Angka Kematian Bayi selama beberapa tahun terakhir masih fluktuatif.



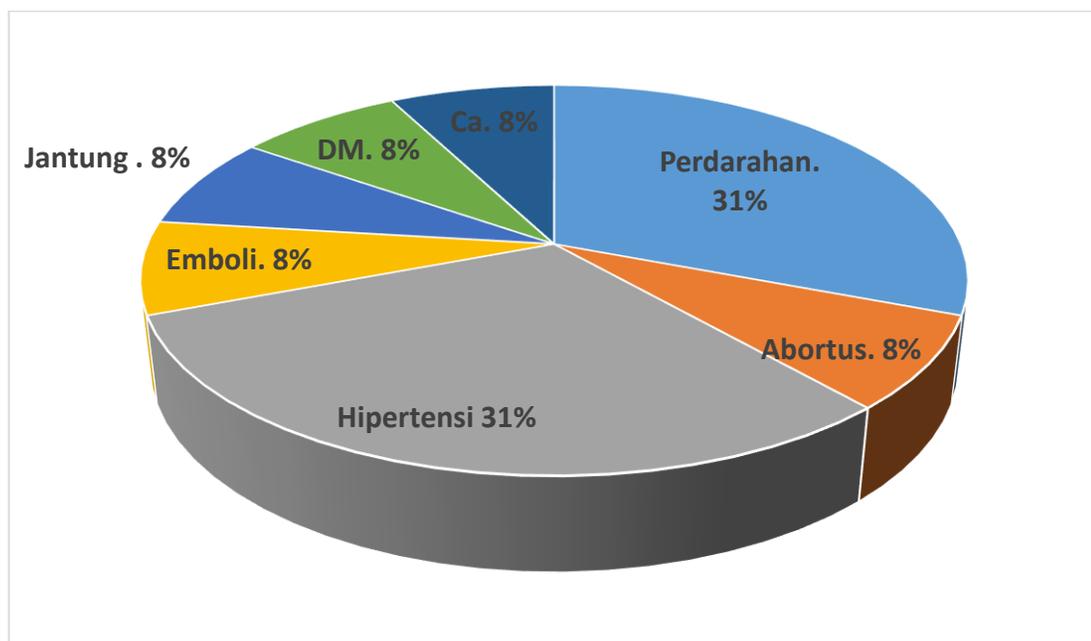
Gambar 2. Rasio Kematian Ibu dan Kematian Bayi Kota Cimahi Tahun 2017-2022

Rasio kematian ibu di Kota Cimahi pada tahun 2022 sebesar 123,88/100.000 Kelahiran Hidup (13 kasus), dan Rasio kematian

bayi sebesar 5,34/1000 Kelahiran Hidup (56 kasus). Rasio kematian ibu dan Rasio kematian bayi kota Cimahi masih dibawah target Nasional berdasarkan Pedoman Indikator Program Kesehatan Masyarakat Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Strategi Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yang menetapkan target Rasio Kematian ibu sebesar 205/100.000 KH dan target rasio kematian bayi sebesar 18,6/1000 Kelahiran Hidup pada Tahun 2022.

Rasio Kematian Ibu dan rasio kematian Kota Cimahi Tahun 2017-2022 bergerak fluktuatif. Rasio kematian ibu menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2021 dengan 196,08 per 100.000 kelahiran hidup, sementara Rasio kematian bayi menunjukkan angka tertinggi pada tahun 2017 yaitu 7,14 per 1000 Kelahiran Hidup.

Penyebab kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2022 dapat dilihat pada grafik berikut:



Gambar 3. Penyebab Kematian Ibu di Kota Cimahi Tahun 2022

Berdasarkan tabel terlihat bahwa Penyebab langsung Kematian Ibu adalah Perdarahan 4 kasus (31%), Hipertensi 4 kasus (31%) dan akibat Abortus, penyakit jantung, Emboli, Diabetes serta Ca masing-masing sebanyak 1 kasus (8%).

Bila dilihat kasus kematian ibu berdasarkan usia, kematian ibu terbanyak pada usia ≥ 35 tahun yaitu 69,23%, sedangkan

pada usia 20-34 tahun sebesar 30,77%. Kehamilan di Usia ≥ 35 tahun akan meningkatkan resiko selama persalinan kehamilan dan persalinan. Umur yang terlalu tua dapat mengakibatkan komplikasi pada kehamilan, persalinan maupun nifas. Kehamilan di usia tua akan meningkatkan kejadian perdarahan dan eklamsi yang dapat mengakibatkan kematian ibu. Perlu upaya penguatan program Keluarga Berencana untuk mengatasi kehamilan pada usia Usia ≥ 35 tahun khususnya untuk ibu dengan anak sudah lebih dari tiga.

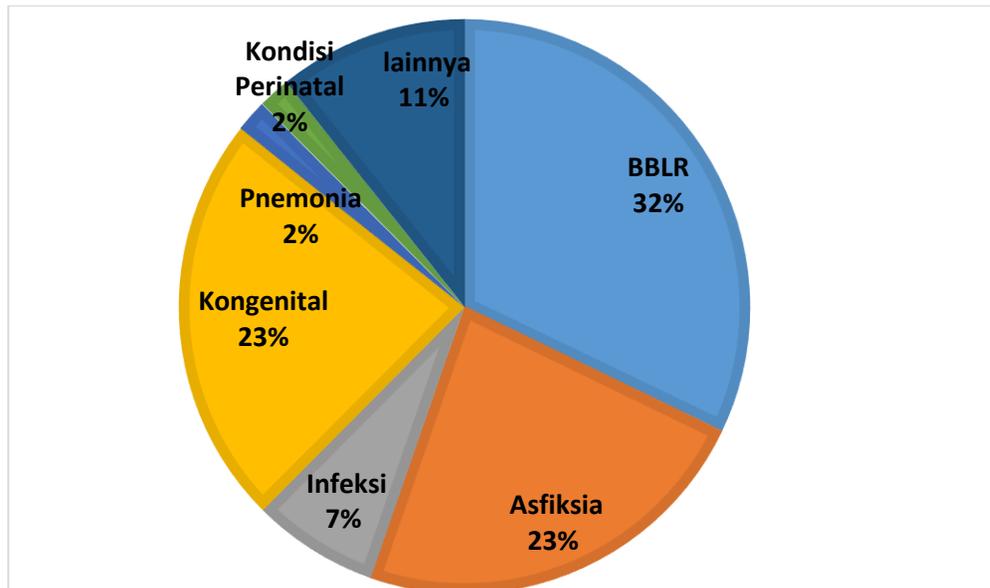
Berdasarkan tempat kematian ibu melahirkan, 11 kasus (84,62%) terjadi di Rumah Sakit dan sisanya sebanyak 2 kasus (15,38%) di rumah. Masih adanya kasus kematian ibu di rumah menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap tanda bahaya pada ibu hamil, ibu bersalin dan ibu nifas masih kurang.

Penyebab tidak langsung kematian ibu (Kondisi tiga terlambat) masih terjadi yaitu terlambat pengambilan keputusan untuk dirujuk ke fasyankes yang tepat, terlambat sampai ke tempat rujukan, dan terlambat ditangani dengan tepat. Untuk itu, harus dibangun sistem rujukan yang kuat antara puskesmas dan rumah sakit, termasuk peningkatan kompetensi SDM pelayanan maternal perinatal. Penguatan puskesmas PONEK dan RS PONEK. Selain tetap melanjutkan kegiatan audit kematian maternal perinatal untuk mengetahui penyebab kematian ibu dan bayi baru lahir dan merencanakan intervensi sesuai penyebab masalah.

Upaya yang dilaksanakan untuk menurunkan kematian ibu, meningkatkan mutu pelayanan dengan meningkatkan kualitas pelayanan Ante Natal Care sesuai standar dan skrining kehamilan risiko tinggi. Meningkatkan pengetahuan ibu hamil, keluarga dan masyarakat tentang kehamilan, persalinan, pengenalan tanda bahaya serta persiapan persalinan dan pencegahan komplikasi melalui kelas ibu dan Pelaksanaan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi).

Penyebab kematian bayi terbesar adalah BBLR sebanyak 18 kasus (32,14%), Asfiksia 13 kasus (23,21%), Kelainan Kongenital 13

kasus (23,21%), infeksi 4 kasus (7,14%), kondisi perinatal 1 (1,79%), Pnemonia 1 (1,79%), sebab lain 6 (10,71%).



Gambar 4. Penyebab Kematian Bayi di Kota Cimahi Tahun 2022

Kondisi Cakupan Pelayanan kesehatan bayi di Kota Cimahi tahun 2022 sudah cukup baik, Capaian kunjungan neonatal 1 (KN1) 99,2%, capaian kunjungan neonatal lengkap (KN3) 95,2% dan Capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) 96,7%, peningkatan cakupan pelayanan ini belum diikuti dengan penurunan kematian bayi.

Sebab Kematian bayi terbanyak adalah BBLR, kematian bayi akibat BBLR dapat disebabkan kurangnya asupan gizi pada usia remaja, gizi ibu saat hamil yang menyebabkan Anemia, kurang energi kronis KEK. Sebab lain adalah penyakit yang diderita ibu, serta kondisi penyakit bayi. Jumlah ibu hamil KEK di Kota Cimahi tahun 2022 sebesar 6,3% (692 kasus) dari sasaran ibu hamil yang diperiksa, sedangkan ibu hamil KEK sebesar 4,24% (465 kasus). Kegiatan deteksi dini resiko pada ibu hamil diharapkan dapat menemukan penyebab BBLR secara dini sehingga dapat dilakukan intervensi secara optimal. Salah satu intervensi yang telah dilakukan adalah dengan pemberian PMT pada ibu hamil KEK dan anemia, kunjungan rumah dan konseling untuk ibu hamil beresiko.

Penyebab lain kematian bayi adalah asfiksia, perlu rangkaian tindakan yang dilakukan pada bayi sesuai prosedur untuk mencegah

terjadinya kematian bayi. Hal tersebut perlu didukung dengan perbaikan sistem rujukan yang sistematis dan terstruktur serta peningkatan kompetensi SDM terkait pelayanan neonatal dan bayi.

C. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian kinerja keuangan berdasarkan APBD Perubahan Kota Cimahi Tahun Anggaran 2022, Total Anggaran Belanja Dinas Kesehatan Kota Cimahi adalah sebesar Rp. 151.020.796.331,- dengan realisasi belanja sebesar Rp. 122.846.723.245,- (81,34 %) dengan realisasi Kinerja program sebesar 99,49%.

Realisasi anggaran program untuk mewujudkan sasaran strategis diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 15. Realisasasi Anggaran sasaran strategis Dinas Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM	TARGET	REALISASI	%	Sisa Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	82.742.047.036	70.850.612.531	85,63	11.891.434.505
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	64.862.640.595	49.676.907.810	76,59	15.185.732.785
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	3.145.574.200	2.027.914.803	64,47	1.117.659.397
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	69.629.000	53.649.800	77,05	15.979.200
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	200.905.500	123.312.400	61,38	77.593.100
TOTAL		151.020.796.331	122.846.723.245	81,34	28.174.073.086

Hasil Capaian Kinerja Kegiatan Penunjang sebagai berikut :

Tabel 16. Capaian Kegiatan Capaian Kinerja Kegiatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	REALISASI KINERJA (%)	REALISASI KEUANGAN (%)
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	72,24
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	88,76
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	82,42
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	75,92
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100	74,55
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	63,27
		Pemeliharaan barang milik Daerah penunjang	100	67,98
		Peningkatan Pelayanan BLUD	100	79,05
2	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	100	37,89
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	120	85,83
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	105,26	88,52
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	70,35
3	Peningkatan Kapasitas SDM Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	100	64,47
4	Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	100
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh IRT	100	93,42
		Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	100	100
5	Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	101	57,50
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	70,27
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	67,06

Hasil Capaian kegiatan Dinas Kesehatan tahun 2022 sudah baik, dengan tingkat capaian kinerja 99,49% atau penilaian sangat tinggi, Sementara realisasi anggaran sebesar 81,34% dengan penilaian tinggi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan.

Secara umum Dinas Kesehatan Kota Cimahi telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja rasio kematian bayi dan rasio kematian ibu menunjukkan kinerja sangat tinggi.

- a. Hasil pencapaian untuk Indeks Kesehatan tahun 2022 adalah 83,85 kondisi ini telah melebihi target Renstra yaitu 83,12. Capaian kinerja indeks kesehatan tahun 2022 sebesar 100,88% dengan kriteria penilaian sangat tinggi. Parameter dalam pencapaian Indeks Kesehatan adalah AHH (Angka Harapan Hidup). AHH Kota Cimahi Tahun 2022 adalah 74,21.
- b. Capaian kinerja Rasio Kematian Ibu/100.000 KH tahun 2022 sebesar 92,47% mengalami peningkatan kinerja sebesar 62,23% dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 30,24%. Capaian indikator kinerja Rasio Kematian Bayi/1000 KH tahun 2022 adalah 116,62% mengalami peningkatan kinerja sebesar 25,22% dibandingkan capaian tahun 2021 yaitu 91,40%.

B. Rekomendasi

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Kesehatan ke depan.

- a. Peningkatan komitmen dalam penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang dimiliki untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- b. Meningkatkan komitmen pengendalian internal dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- c. Meningkatkan koordinasi lintas program, lintas sektor dan instansi vertikal untuk mendukung pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
- d. Meningkatkan pembinaan, monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap capaian program dan kegiatan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2022 ini disampaikan, semoga dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja pada masa mendatang.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KOTA CIMAHI
DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/Kep. 060 -Dinkes /2022**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI,**

- Menimbang : a. bahwa Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi Tahun 2021 yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang - Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 207);

7. Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 33 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Cimahi (Berita Daerah Kota Cimahi Tahun 2016 Nomor 325);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228) sebagaimana telah dirubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;
9. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 630 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan Kota Cimahi. sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini;
- KEDUA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 4 Januari 2022
**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**



drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
 NOMOR : 440/Kep. 060 - Dinkes /2022
 TANGGAL : 4 Januari 2022
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI TAHUN 2022

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN IKU	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SASARAN	SUMBER DATA
1	2	3	4	5	6	7	8
MISI 1 : Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkepribadian, Berakhlak Mulia, Cerdas, Sehat Dan Unggul							
1	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Indeks Kesehatan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Ratio Kematian Ibu per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah ibu yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 100.000$	115,2	Bidang Kesmas
				Ratio Kematian Ibu per 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu}}{\text{jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut pada kurun waktu yang sama}} \times 1000$	6,4	Bidang Kesmas

Ditetapkan di Cimahi

pada tanggal 4 Januari 2021
**KEPALA DINAS KESEHATAN
 KOTA CIMAHI,**



drg. PRATIWI, M. Kes
NIP. 196206191989012001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAH I**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **drg. PRATIWI, M.Kes.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **LETKOL (PURN) NGATIYANA**

Jabatan : Plt. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, Januari 2022

Pihak Kedua,

Plt. WALI KOTA CIMAH I,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAH I,**

drg. PRATIWI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620619 198901 2 001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 KH)	115,2 per 100.000 KH
		Rasio Kematian Bayi (Per 1000 KH)	6,4 per 1000 KH

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 79,818,163,851.00	APBD, BLUD
2.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 46,375,406,100.00	APBD, APBN
3.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 2,918,150,000.00	APBD
4.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 69,629,000.00	APBD
5.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 236,450,200.00	APBD
	Jumlah Anggaran	Rp 129,417,799,151.00	

Cimahi, Januari 2022

Plt. WALI KOTA CIMAHI,

LETKOL (PURN) NGATIYANA

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

drg. PRATIWI, M.Kes.
Pembina Utama Muda
NIP. 196206191989012001



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Dr. Mulyati, S.Kep., Ners., M.Kes.**

Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kota Cimahi

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **DIKDIK S NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.**

Jabatan : Pj. Wali Kota Cimahi

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Cimahi, November 2022

Pihak Pertama,

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

Dr. Mulyati, S.Kep., Ners., M.Kes.
Pembina

NIP. 19690516 199503 2 002

Pihak Kedua,

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK S NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2022
KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Rasio Kematian Ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	115,2 per 100.000 KH
		Rasio Kematian Bayi (Per 1000 Kelahiran Hidup)	6,4 per 1000 KH

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 82,742,047,036.00	APBD, BLUD
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rp 66,131,813,395.00	APBD, APBN
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 3,145,574,200.00	APBD, APBN
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Rp 69,629,000.00	APBD
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp 200,905,500.00	APBD
Jumlah Anggaran	Rp 152,289,969,131.00	

Pj. WALI KOTA CIMAHI,

DIKDIK S NUGRAHAWAN, S.Si., M.M.

Cimahi, November 2022

KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,

Dr. Mulyati, S.Kep., Ners., M.Kes.
Pembina
NIP. 19690516 199503 2 002

Evaluasi Terhadap Hasil Renja SKPD Lingkup Kota Cimahi
Renja SKPD Dinas Kesehatan Kota Cimahi
Tahun 2022

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp					
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	78	82.742.047.036	79,03	8.299.727.887	79,03	20.357.279.538	79,03	17.243.896.621	79,03	25.064.056.804	79,03	70.964.938.432	101,32	85,77	
		Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi umum	100		100		100		100		100		100		100		
		Persentase ASN yang memiliki kesesuaian kompetensi	100		100		100		100		100		100		100		
1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Monev Yang Disusun;	3	159.753.100	3	52.630.500	3	9.446.000	3	10.344.000	3	42.978.700	3	115.399.200	100	72,24	
1)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen anggaran	4	103.425.700	2	43.150.000	1	1.800.000	1	5.844.000	-	16.388.700	4	67.182.700	100	64,96	Efisiensi Mamin, honorarium , uang saku Forum OPD (Via Zoom)
		Jumlah Dokumen Renja Dinas	1		1		-		-			1		100			
		Jumlah Dokumen Renja Perubahan	1		-		-		1			1		100			
		Jumlah Dokumen Renstra Dinas	1		1		-		-			1		100			
		Laporan Anggaran (Siscobikes)	1		1		-		-			1		100			
		Jumlah Penyelenggaraan Forum Perangkat Daerah	2		2		-		-			2		100			
2)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen LAKIP	1	56.327.400	1	9.480.500	-	7.646.000	-	4.500.000	-	26.590.000	1	48.216.500	100	85,60	Efisiensi Sewa gedung dan belanja penggandaan
		Jumlah Dokumen Laporan SPM	2		1				1			2		100			
		Jumlah Dokumen LPPD dan LKPJ	2		2		-		-			2		100			
		Jumlah Dokumen Monev Kinerja	4		1		1		1		1	4		100			
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Keuangan Yang Disusun;	1	58.960.689.222	1	6.601.369.319	-	17.959.548.888	-	13.957.578.010	-	13.813.240.364	1	52.331.736.581	100	88,76	
3)	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang terfasilitasi gaji dan tunjangan setiap bulan	385	58.665.014.222	380	6.594.024.488	380	17.788.577.151	380	13.915.747.273	385	13.769.581.720	385	52.067.930.632	100	88,75	Target di anggaran perubahan dari 385 menjadi 380
4)	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Sem esteran SKPD	Jumlah laporan keuangan	2	295.675.000	1	7.344.831	-	170.971.737	1	41.830.737	-	43.658.644	2	263.805.949	100	89,22	Honorarium tidak diserap karena Narsum dari BPKAD
		Jumlah peserta pertemuan penyusunan laporan keuangan	355		-	150		205				355		100			
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Yang Dibina	385	135.040.000	-	3.500.000	-	11.000.000	385	91.800.000	-	5.000.000	385	111.300.000	100	82,42	
6)	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pegawai yang difasilitasi bimtek	10	135.040.000	1	3.500.000	-	11.000.000	9	91.800.000	-	5.000.000	10	111.300.000	100	82,42	Kegiatan pembinaan pegawai non ASN dianggarkan 45 orang terserap 9 Orang (sesuai dengan jumlah eksisting Non ASN)
		Jumlah peserta pembinaan pegawai	119		-	119		-				119		100		Target di anggaran perubahan dari 146 menjadi 119	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Adminitrasi Umum;	12	648.533.200	3	55.938.329	3	70.504.606	3	171.787.217	3	194.126.284	12	492.356.436	100	75,92	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
7)	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bulan Penyediaan Komponen Listrik dan Penerangan	12	10.002.000	3	-	3	3.630.500	3	-	3	4.253.500	12	7.884.000	100	78,82	Efisiensi karena Kebutuhan komponen listrik telah terpenuhi
8)	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bulan pemeliharaan perlengkapan/ peralatan kantor	12	137.175.600	3	5.450.000	3	6.600.000	3	61.644.700	3	12.540.000	12	86.234.700	100	62,86	
		Jumlah bulan Penyediaan ATK	12		3		3		3		3		12		100		
		Jumlah set peralatan dan perlengkapan kantor	1		-		-		-		1		1		100		
9)	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga	2	22.884.000	-	-	-	-	1	9.473.617	1	8.697.000	2	18.170.617	100	79,40	
10)	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman	12	150.133.600	3	24.459.300	3	10.021.000	3	29.393.000	3	47.175.000	12	111.048.300	100	73,97	
11)	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah bulan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	153.382.000	3	841.000	3	7.777.000	3	8.411.900	3	81.106.700	12	98.136.600	100	63,98	Cetak Surat Setoran Retribusi Puskesmas sudah tidak diperlukan
12)	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Bulan Fasilitasi, Koordinasi, dan Konsultasi	12	174.956.000	3	25.188.029	3	42.476.106	3	62.864.000	3	40.354.084	12	170.882.219	100	97,67	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan Penyediaan barang milik daerah penunjang urusan	12	20.135.000	3	-	3	-	3	15.010.000	3	-	12	15.010.000	100	74,55	
13)	Pengadaan Mebel	Jumlah pengadaan meubelair	5	20.135.000	-	-	3		1	15.010.000	-	-	4	15.010.000	80	74,55	Sisa Anggaran tidak dapat dilaksanakan karena spesifikasi barang dan harga barang yang kurang sesuai
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	Jumlah bulan Penyediaan jasa penunjang urusan	12	279.771.000	3	28.841.015	3	45.872.580	3	41.525.593	3	60.773.344	12	177.012.532	100	63,27	
14)	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Air	12	100.000.000	3	9.911.521	3	11.600.366	3	11.913.379	3	9.696.909	12	43.122.175	100	43,12	Pembayaran Pemakaian air untuk Pustu Cimenteng di bebaskan kepada PKM Cipagerran
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Komunikasi	12		3		3		3		3		12	-	100		
		Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Listrik	12		3		3		3		3		12	-	100		
15)	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah bulan penyediaan jasa kebersihan kantor	12	179.771.000	3	18.929.494	3	34.272.214	3	29.612.214	3	51.076.435	12	133.890.357	100	74,48	
		Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian	8		8		8		8		8		8	-	100		
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan	12	855.080.000	3	67.679.156	3	136.516.988	3	111.944.688	3	265.172.207	12	581.313.039	100	67,98	
16)	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah bulan pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12	568.840.000	3	49.049.662	3	108.989.774	3	82.257.474	3	144.316.558	12	384.613.468	100	67,61	Pembayaran disesuaikan dengan klaim/tagihan dan standar harga yang lebih tinggi dari hari harga pasar
		Jumlah bulan Penyediaan jasa pemeliharaan kendaraan dinas operasional	12		3		3		3		3		12	-	100		
		Jumlah unit kendaraan yang diasuransikan	26		-		-		-		26		26	-	100		
		Jumlah tenaga Non ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan kematian	2		2		2		2		2		2	-	100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
			I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp			
			K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp							
17)	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Bulan Penyediaan jasa Pemeliharaan Gedung Kantor	12	286.240.000	3	18.629.494	3	27.527.214	3	29.687.214	3	120.855.649	12	196.699.571	100	68,72	Pemeliharaan Gedung Puskesmas Pasirkaliki, Cibeber
		Jumlah tenaga NON ASN yang mendapatkan jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, dan jaminan	4		4		4		4		4		4	-	100		
		Jumlah Paket pemeliharaan gedung	4		-		-		2		2		4	-	100		
8	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Nilai Survey Kepuasan Masyarakat di Puskesmas dengan nilai minimal 80	100	21.683.045.514	-	1.489.769.568	-	2.124.390.476	-	2.843.907.113	100	10.682.765.905	100	17.140.810.644	100	79,05	
18)	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Padasuka yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	12918	2.228.174.539	4.829	97.817.151	4.829	238.095.095	4.829	250.572.393	5.577	1.143.729.278	36.905	1.730.213.917	285,69	77,65	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	80,89							22.418	82,44		82,44	22.418	101,92		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja Puskesmas Melong Asih yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10.304	1.601.798.263	3.101	148.562.499	1.224	137.431.771	1.675	235.162.458	2.659	785.706.488	9.099	1.306.863.216	88,31	81,59	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,14								80,45		80,45	-	101,66		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Melong Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	6.143	1.027.910.177	2.177	94.123.476	1.878	116.971.501	2.552	183.633.207	1.995	595.586.505	8601	990.314.689	140,01	96,34	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,48								80,38		80,38	-	98,65		
		Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Cigugur tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10892	1.698.857.335	2.700	63.528.147	1.762	110.405.568	1.940	129.378.281	1.265	1.034.914.884	8195	1.338.226.880	75,24	78,77	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	79,8								81,40		81,4	-	102,01		
		Jumlah peserta JKN di wilayah puskesmas Cimahi Selatan yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	10752	1.672.899.112	6.558	181.951.389	713	206.283.830	1.344	380.121.764	1.142	849.364.077	10804	1.617.721.060	100,48	96,70	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,35								81,70		81,7	-	99,21		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cipageran yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	11982	2.140.599.204	3.331	136.301.786	1.885	150.906.151	2.117	199.029.430	1.750	976.024.392	10692	1.462.261.759	89,23	68,31	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	81,17								80,23		80,23	-	98,84		
		Jumlah peserta JKN di wilayah kerja puskesmas Cimahi Tengah yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	12481	1.956.200.757	3.904	120.069.471	2.328	163.569.773	2.399	173.763.547	1.164	975.947.700	13624	1.433.350.491	109,16	73,27	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,27								80,92		80,92	-	98,36		
		Jumlah peserta JKN di wilayah Puskesmas Citeureup yang dilayani (50% dari total peserta JKN terdaftar)	9243	1.405.691.816	3.780	100.432.998	2.790	219.151.509	3.974	220.900.446	3.404	658.635.739	16504	1.199.120.692	178,56	85,30	
		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	82,21								81,90		81,9	-	99,62		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
19)	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pembangunan gedung baru puskesmas	0	3.054.214.820	-	13.025.900	-	58.190.200	-	68.538.100	-	1.329.047.844	-	1.468.802.044	-	48,09	Target di anggaran perubahan dari 2 menjadi 0 Lift Puskesmas cipageran gagal tender 1,1M Perlu pengeseran dialokasikan 970jt di 2022
		Jumlah Pembangunan sarana IPAL	1		-		-		-		1		1	-	100		
		Jumlah bulan jasa pendukung kegiatan pembangunan puskesmas	12		3		3		3		3		12	-	100		
		Jumlah Dokumen Kelengkapan Perijinan Puskesmas	2		-		-		-		2		2	-	100	Pertek dan SLF Puskesmas Cipageran	
		Jumlah Dokumen Fisibility Study	4								3		3	-	75	FS Cibereum, Cimahi Tengah, Cimahi Utara sudah dilaksanakan	
		Jumlah pengadaan instalasi pemadam kebakaran (hydran) dan canopy gedung Puskesmas Ranap Persalinan Cipageran	2								2		2	-	100	Pengadaan Hydran, Pengadaan Canopy	
		Jumlah Dokumen perencanaan Pembangunan Puskesmas	2								2		2	-	100	Perencanaan PKM Cimahi Tengah, Cimahi Utara	
20)	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah unit mobil Ambulan	1	450.000.000	-	-	-	-	1	320.000.000	-	-	1	320.000.000	100	71,11	Kegiatan sudah 100% Efisiensi pengadaan Ambulance
		Jumlah unit mobil Pick up	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengadaan Mobil Pickup di Drop di anggaran perubahan
21)	Rehabilitas dan pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang mendapat rehabilitasi	1	1.961.332.675	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Rehabilitasi tidak dapat dilaksanakan terkedala SILPA DAK masuk diperubahan. Rencana akan dimasukkan di murni 2022
22)	Pengadaan Obat, Vaksin	Jumlah jenis pengadaan obat yandas DAK	100	3.949.961.200	19	6.032.600	-	43.311.500	66	1.443.613.916	15	225.448.379	100	1.718.406.395	100	43,50	Obat tidak semua diserap karena sesuai kebutuhan, dan ditrsibusi obat vaksin karena obat diambil oleh puskesmas
		Jumlah program yang mendapatkan pengadaan obat	2		-	-	-	-	2		-	-	2		100		
		Jumlah peserta pertemuan pengelola obat dan Perbekkes Puskesmas	70		10		25		10		25		70		100		
		Jumlah kegiatan bongkar muat obat	100		42		-		43		15		100		100		
		Jumlah jenis pengadaan obat yandas APBD	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan pengadaan obat yandas di Drop di anggaran perubahan
24)	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Jumlah pengadaan BHP	2	2.977.300.000		-	-	-	-		2	1.188.990.000	2	1.188.990.000	100	39,94	Rencana realisasi 1M :50% (Efisiensi sebagian tidak diserap karena dropping Cartridge TB dan Reagen HIV dari pusat
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Indikator SPM dengan capaian lebih dari 80%	10	51.859.131.600	1	628.496.300	2	16.574.383.842	7	2.534.036.938	12	24.775.874.877	12	44.512.791.957	120	85,83	
		Peningkatan Cakupan Kepesertaan JKN	3,3		1,04		1,04		1,04		4,01		4,01		121,37	Kepesertaan yang dibayar APBD sebesar 80084	
		Cakupan Balita Gizi Buruk yang ditangani	100		100		100		100		100		100		100		
		Cakupan penyelidikan Epidemiologi yang ditangani	100		100		100		100		100		100		100		
		Jumlah Kelurahan ODF	4		4		4		4		4		4		100		
		Jumlah bulan Laporan Sistem Kewaspadaan Dini Respon (SKDR)	12		3		3		3		3		12		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
					I		II		III		IV						
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
24)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.689	489.524.900	2.592	3.800.000	2.633	47.964.800	2.600	119.090.000	2.717	98.421.800	10.542	269.276.600	98,62	55,01	Efisiensi honor karena fasilitator kota, Efisiensi perjalanin, Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan ibu hamil oleh tenaga SPOG	16	-	-	8	-	-	-	8	-	16	-	100			
		Jumlah kegiatan pendampingan HPK	2	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	100			
		Jumlah peserta rapat koordinasi kesehatan masyarakat	40	-	-	-	-	40	-	-	-	40	-	100			
		Jumlah pertemuan AMP	5	-	-	2	-	1	-	2	-	5	-	100			
		Jumlah pertemuan peningkatan kapasitas Bidan	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100			
25)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10608	832.650.000	2.548	109.722.469	2.647	167.331.073	2.594	168.086.073	2.718	220.844.678	10.507	665.984.293	99,05	79,98	Transport rujukan jampersal Tidak diserap karena tidak ada yang mengajukan pendampingan rujukan
		Pengelolaan pelayanan kesehatan ibu bersalin	15	-	15	-	15	-	15	-	-	15	-	100			
		Persentase penyerapan anggaran jampersal dari pengajuan klaim	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah pertemuan orientasi sistem informasi mat neo, MPDN dan e kohort (BOK)	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100			
26)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	10.148	129.995.000	2.357	-	2.559	15.075.000	2.488	16.875.000	2.587	53.000.000	9.991	84.950.000	98,45	65,35	Transport pengiriman sampel SHK dan Monev BBL Risti tidak diserap. (monev sudah dilaksanakan bersamaan dengan monev KIA)
		Jumlah peserta pelatihan/penyeliaan fasilitatif di puskesmas PONED	120	-	-	-	-	-	-	120	-	120	-	100			
		Jumlah pertemuan pendampingan bayi baru lahir risiko tinggi	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	100			
		Jumlah pertemuan orientasi SHK	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	100			
		Jumlah kegiatan pelaksanaan pemeriksaan bayi baru lahir oleh SPA	16	-	-	-	-	5	-	11	-	16	-	100			
27)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	25.380	701.569.000	7.320	-	6.730	36.405.000	7.828	172.559.700	3.502	131.510.000	25.380	340.474.700	100	48,53	Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan iuknis
		Jumlah peserta kegiatan penguatan guru PAUD tentang buku KIA & SDIDTK	120	-	-	-	-	120	-	-	-	120	-	100			
		Jumlah peserta sosialisasi PERDA KIBBLA	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Kegiatan di Drop di anggaran perubahan
28)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Penduduk Usia Pendidikan Dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	69586	647.875.500	62.717	-	5.406	16.530.000	1.000	56.345.000	463	315.577.000	69.586	388.452.000	100	59,96	Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan iuknis
		Jumlah peserta Pertemuan Program UKS	50	-	-	-	-	-	-	50	-	50	-	100			
		Paket evaluasi sekolah sehat	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak ada penilaian sekolah sehat
		Jumlah peserta pertemuan Pengembangan Kader kesehatan	60	-	-	-	-	-	-	60	-	60	-	100			
29)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah penduduk usia 15-59 tahun yang mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar	249848	258.451.400	59.528	15.977.700	66.531	71.331.000	61.689	15.605.000	60.821	67.656.700	248.569	170.570.400	99	66,00	Efisiensi Narsum, Gedung, spanduk Fc, transport peserta, Monev Ke Puskesmas. Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan iuknis

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
					I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jasa Petugas Penunjang P2PTM KESWA	1		1		1		1		1		1		100		
		Penguatan pandu PTM di FKTP	20		7		2		-		11		20		100		
		Jumlah Pertemuan Monev Usia Produktif	5		2		2		1		-		5		100		
30)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah penduduk usia 60 tahun atau lebih mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	31.781	251.768.400	14.925	2.000.000	8718	41.383.000	6.691	33.940.000	1.447	52.310.000	31.781	129.633.000	100	51,49	Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan iuknis
		Jumlah peserta kegiatan bulan pemeriksaan lansia	200		-		150		-		50		200		100		
		Jumlah peserta Pertemuan Program Lanjut usia	120		40		18		-		62		120		100		
31)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	58026	139.136.400	12.895	692.400	15.014	47.527.000	13.379	11.135.000	16.738	15.580.000	58.026	74.934.400	100	53,86	Efisisensi Narsum, Transport peserta, Transport monev Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya
		Jumlah peserta Pertemuan Program Hipertensi bagi petugas Fasyankes	208		-		92		116		-		208		100		
		Jumlah peserta Sosialisasi dan Pelayanan Hipertensi Tingkat Kota Cimahi	97		97		-		-		-		97		100		
32)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah penderita DM usia lebih dari sama dengan 15 tahun yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	9815	116.044.400	2.897	692.400	3.260	16.152.000	2.322	14.915.000	1.336	32.305.000	9.815	64.064.400	100	55,21	Kegiatan sudah dilaksanakan, Efisiensi narsum, transport peserta, Transport monev Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya
		Pertemuan Program Diabetes Mellitus bagi petugas Fasyankes	168		-		99		69		-		168		100		
		Sosialisasi dan Pelayanan DM Tingkat Kota Cimahi	100		-		-		-		100		100		100		
33)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Penanganan dan pendamping ODGJ gaduh gelisah	216	221.864.900	55	24.386.900	55	41.160.000	52	37.574.000	54	60.353.000	216	163.473.900	100	73,68	Efisiensi : Transport monev ke Puskesmas, Fc Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya
		Jumlah penderita ODGJ berat yang mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar	932		508		265		116		43		932		100		
		Jumlah peserta Pertemuan program jiwa bagi petugas puskesmas, klinik dan RS	132		82		-		50		-		132		100		
34)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah orang terduga TB yang mendapat pelayanan TB sesuai standar	2602	337.479.300	766	29.060.100	841	107.916.100	995	49.760.000	-	63.922.100	2.602	250.658.300	100	74,27	Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan iuknis
		Jumlah peserta jejaring internal hospital linkage.	30		-	-	30		-		-		30		100		
		Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi program P2PM	76		-	-	-		57		19		76		100		Transport monev ke Puskesmas tidak diserap, kegiaiatan sudah dilaksanakan
		Jumlah peserta Sosialisasi Program TB	445		150		310		-		-		460		103		
35)	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar	6456	289.050.000	1.635	20.609.400	1.813	44.346.400	1.995	53.456.200	1.588	75.381.000	6.456	193.793.000	100	67,04	kegiatan monev tidak diserap Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkemkala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan iuknis
		Jumlah bulan jasa pengelola pelayanan program HIV	12		3		3		3		3		12		100		

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
					I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta Pertemuan Sosialisasi Program HIV	310		65		205		40		-		310		100		
36	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Jumlah paket bahan VTM (untuk pemeriksaan PCR)	3750	1.094.437.800	3.750	525.000	-	42.042.975	-	548.885.325	-	25.790.300	3.750	617.243.600	100	56,40	VTM sebagian tidak diserap kren ada drop dari prov dan kasus melandai, jasa tenaga 120jt, jasa dan honor tenaga 86jt
		Jumlah shift Penanggulangan Bencana TGC	0		-		-		-			-		-	-		Kegiatan pengadaan obat yandas di Drop di anggaran perubahan
		Jumlah bulan jasa tenaga administrasi pengelolaan KLB	0		-		-		-			-		-	-		Kegiatan pengadaan obat yandas di Drop di anggaran perubahan
		Persentase realisasi anggaran hibah PMI	100%		-	100		-				100		100			
37	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah peserta pertemuan Pelayanan Kesehatan Gizi	489	1.069.450.800	-	-	85	95.166.060	276	176.793.400	60	490.705.555	421	762.665.015	86,09	71,31	Kegiatan BOK Stunting/DAK Non Fisik terkendala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan juknis
		Jumlah paket pengadaan PMT	163		-	55		107			-		162		99		
38	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Jumlah kader Pos UKK yang dilatih	28	194.699.000	-	16.804.831	28	22.890.644	-	25.989.830	-	47.301.644	28	112.986.949	100	58,03	Realisasi kegiatan 100%
		Jumlah Kegiatan pengelolaan program pelayanan kesehatan kerja dan olah raga	12		3		3		3		3		12		100		
		Pengukuran Kebugaran Jasmani Calon Jemaah Haji Indonesia	600		476		-		-		-		476		79,33		sasaran : 548 CJHI, yang datang 476
		Jumlah kegiatan pertemuan koordinasi pelaksanaan GP2SP tingkat Puskesmas (BOK)	1		-		-		1		-		1		100		Transport tidak diserap
		Jumlah kegiatan pemeriksaan kebugaran Jasmani (BOK)	3		-		-		-		3		3		100		
39	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah inspeksi Sarana Air Minum (SAM) pada industri/fasilitas.	80	361.044.800	-	-	80	16.261.000	-	147.042.800		107.821.000	80	271.124.800	100	75,09	
		Jumlah Pemeriksaan sampel Depot Air Minum (DAM)	65		-		-		65				65		100		
		Jumlah kegiatan peningkatan jejaring laboratorium dalam penguatan kalibrasi alat deteksi cepat uji kualitas air (BOK)	1		-		1		-				1		100		
		Jumlah Kegiatan pertemuan sosialisasi RPAM dan penguatan uji internal (BOK)	1		-		-		1				1		100		
40	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah jenis pengadaan Media Promosi Kesehatan	4	1.111.928.300	1	14.925.300		91.079.000	3	251.414.600		311.090.000	4	668.508.900	100	60,12	Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkendala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan juknis
		Jumlah media promosi yang mendapatkan pemeliharaan	4		-		-		-		3		3		75		
		Jumlah Penyuluhan di luar Gedung	20		4				16				20		100		
		Jumlah peserta Pembinaan dan money program	40		20				20				40		100		
		Jumlah Peserta pengembangan Kompetensi petugas Promkes	30		-		-		-		30		30		100		
		Jumlah pertemuan edukasi dan advokasi kesehatan	3		-		-		3				3		100		
41	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Kegiatan pengelola administrasi program surveilans	13	147.309.600	13	15.165.600	13	20.078.690	13	16.460.310	13	26.395.000	13	78.099.600	100	53,02	Pengawasan jemaah tidak diserap semua karena kuota CJH dibatasi

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan		
					I		II		III		IV								
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
		Jumlah laporan Penemuan Kasus Non PD3I	12		3		3		3		3		3		12		100		
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan jemaah haji	556		90		161		-		-		-		251		45		Jumlah sesuai kuota jemaah haji yang disetujui yaitu 251 jamaah
		Jumlah peserta pertemuan Siskohatkes	25		25		-		-		-		-		25		100		
		Jumlah perjalanan pengawalan dan penjemputan jemaah haji	4		-		1		3		-		-		4		100		
		Jumlah sampel penyelidikan epidemiologi (PE)	57		21		-		36		-		-		57		100		
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi program surveilans	200		-		-		-		200		200		200		100		tidak diserap karena Kegiatan bersamaan di Covid
42	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Jumlah peserta pertemuan pengelolaan upaya kesehatan khusus	160	232.586.300	120	55.867.000	40	88.755.300	-	18.200.000		58.947.600	160	221.769.900	100	95,35			
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi PIS- PK	156		57		40		-		59		156		100				
		Jumlah peserta pertemuan Sistem Pelayanan Rujukan	100		50		-		50		-		100		100				
		Jumlah shift kegiatan P3K	80		5		40		12		23		80		100				
43	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah peserta pertemuan program endemik epidemik dan zoonosis	172	910.692.000	-	113.346.200	60	129.347.000	112	149.969.000	-	230.492.400	172	623.154.600	100	68,43			Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkendala dalam pelaksanaan karena adanya perubahan juknis
		Jumlah Kegiatan pengendalian vektor	60		26		52		-		-		78		130				
		Jumlah Pertemuan evaluasi dan sosialisasi program (ISPA, Diare, dan Hepatitis, kanker, indra, RBM, Kusta)	8		2		4		2		-		8		100				
44	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah pembiayaan 60%	83000	41.013.122.900	78.703	187.747.000	79.880	15.295.893.600	79.310	357.865.000,00	79.660	22.198.687.100	79.660	38.040.192.700	96	92,75			
		Jumlah peserta JKN yang dibayarkan oleh pemerintah daerah Provinsi pembiayaan 40%	83.000		78.703		79.880		79.310		79.660		79.660		96				
		Jumlah peserta Pertemuan JKN	70		35		-		-		35		70		100				
		Jumlah bulan Pembayaran Pelayanan Kesehatan maskin di luar peserta JKN	12		3		3		3		3		12		100				
		Jumlah peserta JKN PBPu dan BP (mandiri) yang mendapat bantuan	79.500		21.081		58.579		62.235		80.084		80.084		101				Target perubahan dari 49.000 menjadi 79.500
45	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Jumlah paket Evaluasi lingkungan bersih dan sehat	3	119.952.400	-	11.422.500	-	32.210.200	-	30.849.700	-	37.670.000	-	112.152.400	-	93,50			Evaluasi Lingkungan Sehat tidak dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat penilaian minimal 60% posisi awal 26% akhir tahun 2022 mencapai 60%
		Jumlah deklarasi Kelurahan ODF	5		-		-		-		5		5		100				
		Jumlah pembinaan kota sehat tingkat provinsi	1		-		-		-		-		-		-				
		Jumlah pembinaan kota sehat tk. kota	12		-		-		5		7		12		100				
		Jumlah peserta pertemuan koordinasi tim pembina kota sehat	30		-		-		30		-		30		100				
		Jumlah peserta rapat koordinasi pra ODF	130		-		-		52		78		130		100				
		Jumlah kegiatan wirausaha sanitasi	1		1		-		-		-		1		100				transport tidak diserap 100%
		Jumlah pelatihan fasilitator STMB	1		-		1		-		-		1		100				transport tidak diserap 100%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
					I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
46	Operasional Pelayanan Puskesmas (BOK)	Jumlah PKM	13	122.010.000	13	-	13	16.205.000	13	13.860.000	13	28.515.000	13	58.580.000	100	48,01	Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkendala dalam pelaksanaan karena adanya
47	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah jasa pendampingan konsulen KIPI	10	116.393.000	-	408.000	-	62.158.000	-	5.000.000	10	8.673.000	10	76.239.000	100	65,50	Transport petugas tidak diserap, kegiatan tetap berjalan. Belanja cetak dan ATK tdk diserap karena tidak kegiatan pencaangan di 2022
		Jumlah paket asuransi KIPI vaksin Covid 19	1		-		-		-				-		-		Tidak ada KIPI
		Jumlah pembelian Trash bag sampah medis	25		-		-		-				-		-		Anggaran tidak diserap pelayanan Vaksin dilakukan oleh PKM
		Jumlah jenis bahan habis pakai; belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor	8		-		-		-				-		-		pelayanan Vaksin dilakukan oleh PKM
		Jumlah bulan jasa tenaga Administrasi/ tenaga ahli IT	12		3		3		3		3		12		100		Anggaran tidak diserap karena tenaga dipenuhi dari provinsi
48	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas yang melaksanakan penilaian re akreditasi	7	713.716.000	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	Juknis Pelaksanaan Akreditasi Berdasarkan Permenkes 34 Tahun 2022 Baru ditetapkan Bulan Nopember 2022 Pelaksanaan akreditasi 7 PKM diundur menjadi
49	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah pertemuan koordinasi pelaksanaan imunisasi	40	236.379.500	-	5.343.500	40	9.175.000	-	42.366.000	-	16.925.000	40	73.809.500	100	31,23	Asuransi KIPI tidak diserap karna tidak ada kasus
		Jumlah peserta pertemuan Audit KIPI	100		50		50		-		-		100		100		
		Jumlah peserta pertemuan persiapan pelaksanaan vaksin	120		-		-		120		-		120		100		
		Persentase realisasi asuransi KIPI	100		-		-		-		-		-		-		Tidak ada kejadian KIPI
		Jumlah peserta sosialisasi persiapan kampanye MR untuk kader	90		-		-		90		-		90		100		
		Jumlah jenis dokumentasi dan periklanan pencaangan kampanye MR	3		-		-		3		-		3		100		
11	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan	Ketepatan waktu pelaporan Puskesmas	95	210.700.300	92,30	15.728.831	100	18.765.737	100	29.493.067	100	79.756.144	100	186.501.779	105,26	88,52	
50	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah jenis dokumen Profil Kesehatan	2	52.217.000	-	-	2	4.744.000	-	-	-	38.014.000	2	42.758.000	100	81,89	Efisiensi karena harga cetak lebih murah dari standar harga
		Jumlah Peserta Pertemuan Penyusunan Profil	36		36		-		-		-		36		100		
51	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Bulan Jasa pemeliharaan sistem dan jaringan LAN	12	83.419.200	3	11.741.731	3	18.765.737	3	20.658.537	3	28.556.144	12	79.722.149	100	95,57	
		Jumlah Peserta Pertemuan Pembuatan aplikasi SIMPUS	92		-		-		-		92		92		100		
52	Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet	Jumlah Pengadaan perangkat Komputer	5	75.064.100	-	3.987.100	-	-	5	8.834.530	-	51.200.000	5	64.021.630	100	85,29	Efisiensi karena harga cetak lebih murah dari standar harga
		Jumlah Pengadaan Printer	4		-		-		4		-		4		100		
12	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Puskesmas dengan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) Baik	3	400.000.000	-	21.996.700	-	97.467.730	-	97.666.105	5	64.285.100	5	281.415.635	167	70,35	
53	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah peserta pertemuan Penilaian Kinerja Puskesmas	45	400.000.000	-	21.996.700	45	97.467.730	-	97.666.105	-	64.285.100	45	281.415.635	100	70,35	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
					I		II		III		IV						
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
		Jumlah peserta pertemuan kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat	45		-		45		-		-		45		100		
		Jumlah paket penilaian Puskesmas berprestasi	3		-		-		-		-		-		-		
		Jumlah puskesmas yang mengikuti pertemuan mutu puskesmas	6		-		-		6		-		6		100		
		Jumlah puskesmas yang mengikuti Movev mutu dan akreditasi puskesmas	6		-		6		6		-		6		100		
		Jumlah puskesmas yang melaksanakan pembinaan mutu akreditasi puskesmas	13		11		-		2		-		13		100		
														Rata - rata Capaian Kinerja (%)		99,22	
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Tingkat Pemenuhan Standar Minimal Tenaga Kesehatan	95	3.145.574.200	100	9.120.700	100	582.476.449	100	640.578.129	100	795.739.525	100	2.027.914.803	105,26	64,47	
13	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Profil Rencana kebutuhan SDMK	1	3.145.574.200	-	9.120.700	1	582.476.449		640.578.129	-	795.739.525	1	2.027.914.803	100	64,47	
54	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Nakes Non ASN yang mendapatkan insentif	120	2.768.424.200	-	-	51	528.686.949	9	496.682.129	37	795.739.525	97	1.821.108.603	81	65,78	Target di anggaran perubahan dari 165 menjadi 120 Realisasi sesuai ajuan insentif Nakes non ASN dari Puskesmas Kegiatan bersumber DAK Non Fisik (BOK) terkendala dalam pelaksanaan karena adanya
55	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah peserta pembinaan jabatan fungsional	45	377.150.000	45	9.120.700	-	53.789.500	-	143.896.000	-	-	45	206.806.200	100	54,83	Perjadin tidak di serap
		Jumlah peserta pembinaan tenaga kesehatan teladan	90		30		60		-		-		90		100		
		Jumlah peserta Pertemuan pembinaan SDMK per profesi	175		70		105		-		-		175		100		
		Jumlah laporan Pertemuan Penyusunan informasi tenaga kesehatan	2		-		1		-		1		2		100		
		Jumlah peserta pelatihan SDM Kesehatan	25		-		-		25		-		25		100		
														Rata - rata Capaian Kinerja (%)		98,26	
														Predikat Kinerja		Sangat Tinggi	
IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase sarana kefarmasian dan Penyediaan Makanan dan Minuman yang dibina dan sesuai standar	96	69.629.000	100	1.400.000	100	22.908.900		9.125.000	-	20.215.900	100	53.649.800	100	77,05	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan
			I		II		III		IV		K		Rp		K	Rp	
			K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
14	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase apotik, toko obat, optik, UMOT yang mendapat rekomendasi	100	20.850.000	100	1.400.000	100	-	9.125.000	-	-	100	10.525.000	100	50,48		
55	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah peserta pembinaan dan pengawasan sarana kesehatan	60	20.850.000	60	1.400.000	-	-	9.125.000	-	-	60	10.525.000	100	50,48	Efisiensi karena kegiatan dilaksanakan dengan metode zoom meeting	
		Jumlah peserta pembinaan PJAS	70		-	-	70					70		100			
15	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Persentase sarana IRTP yang diaudit	100	40.854.000	18	-	32	14.983.900	-	-	50	20.215.900,00	100	35.199.800	100	86,16	
56	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah peserta pertemuan PKP (Penyuluhan Keamanan Pangan)	120	40.854.000	-	-	60	14.983.900	-	-	60	20.215.900,00	120	35.199.800	100	86,16	
		Jumlah sampel pemeriksaan post market yang diperiksa	50		-	-	25		-	-	25		50		100		
		Jumlah sarana IRTP yang mendapatkan penyuluhan	120		-	-	60		-	-	60		120		100		
16	Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang mendapat rekomendasi	100	7.925.000	100	-	100	7.925.000	-	-	-	100	7.925.000	100	100		
57	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	Jumlah peserta pelatihan Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)	50	7.925.000	-	-	50	7.925.000	-	-	-	50	7.925.000	100	100		
												Rata - rata Capaian Kinerja (%)		100			
												Predikat Kinerja		Sangat Tinggi			
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Cakupan Rumah Tangga yang ber PHBS	53	200.905.500	-	-	-	25.667.500	-	12.675.150	53,40	84.969.750	53,4	123.312.400	101	61,38	

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan yang dievaluasi (2022)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Kinerja		Tingkat capaian Kinerja		Keterangan	
			K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp		
					K	Rp	K	Rp	K	RP	K	Rp						
17	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di perkantoran	11	134.384.300	-	-	-	3.000.000	-	11.039.700	11,11	63.234.500	11,11	77.274.200	101	57,50		
58	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Pembinaan dan Pengembangan SBH	30	134.384.300	-	-	30	3.000.000	-	11.039.700	-	63.234.500	30	77.274.200	100	57,50	Kegiatan HKN, Rapat satgas KTR, Germas 105	
		Pengiriman Kontingen SBH	0		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Tidak pengiriman SBH	
		Pertemuan Advokasi dan Penyusunan Perwal KTR	1		-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100			
		Jumlah peserta TOT implentasi KTR	20		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
18	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan strata RW Siaga aktif minimal Purnama	62	44.508.700	-	-	-	20.827.000	-	615.400	100	9.833.300	100	31.275.700	161	70,27		
59	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah peserta pembinaan Pokja Kelurahan Siaga Sehat	40	44.508.700	-	-	40	20.827.000	-	615.400	-	9.833.300	40	31.275.700	100	70,27		
		Jumlah peserta Monitoring dan evaluasi pendataan PHBS rumah tangga	30		-	-	30	-	-	-	-	-	30	-	100		Target di anggaran perubahan dari 80 menjadi 30	
		Promosi kesehatan dan Penggerakan masyarakat dalam Hari Tanpa Tembakau	1		-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	100			
19	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta Pembinaan UKBM	75	22.012.500	-	-	50	1.840.500	-	1.020.050	-	11.901.950	75	14.762.500	100	67,06	Target di anggaran perubahan dari 50 menjadi 75	
60	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah peserta Pembinaan UKBM	75	22.012.500	-	-	50	1.840.500	-	1.020.050	-	11.901.950	75	14.762.500	100	67,06		
																	Rata - rata Capaian Kinerja (%)	100
																	Predikat Kinerja	Sangat Tinggi
JUMLAH ANGGARAN TOTAL DINKES				151.020.796.331														
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM						8.995.528.918		37.780.451.396		22.399.623.026		53.628.384.323		122.846.723.245	99,41	81,34		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM															99,41	81,34		
PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM															Sangat Tinggi	Tinggi		



PEMERINTAH KOTA CIMAHI

DINAS KESEHATAN

Komplek Perkantoran Pemkot Cimahi Gedung C Lantai III
Jl. Rd. Demang Hardjakusumah Telp. 022-6632197 Fax. 022-6632321 Kota Cimahi

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI NOMOR : 440/SK- 343 /Dinkes/2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

KEPALA DINAS KESEHATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116);
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara, Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cimahi tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2018 nomor 228) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Cimahi Tahun 2017-2022;

6. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cimahi;
7. Peraturan Walikota Cimahi Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Cimahi Nomor 630 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Cimahi Tahun 2021).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI.**

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum pada lampiran I keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini;

KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cimahi
pada tanggal 21 Januari 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**



drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI
NOMOR : 440/SK- 343 /Dinkes/2022
TANGGAL : 21 Januari 2022
TENTANG : TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKIP) TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI

SUSUNAN TIM

- I. **Penanggung Jawab** : Kepala Dinas Kesehatan
- II. **Ketua** : Sekretaris Dinas Kesehatan
- III. **Sekretaris** : Ka.Sub.Bag.Program dan Informasi Dinas Kesehatan
- IV. **Anggota** :
1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan
 2. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat
 3. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalain Penyakit
 4. Ka.Sub.Bag. Keuangan Kepegawian dan Umum
 5. dr. Indah Gilang Indira
 6. Sustiyanti Pusporini, SKM
 7. Irma Gilang Windya, SKM
 8. Elly Herlia, S.Farm., Apt
 9. Siti Sopiah, SKM, M.M
 10. dr. Benky Octavianus, TS
 11. Puji Astuti, SKM, MM
 12. dr. Romi Abdurakhman
 13. Nurkarti Azni, SKM, MKM
 14. Wawan Erawan, SAP, SKM
 15. Yani Handayani, SKM,MKM



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001

LAMPIRAN I : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**
NOMOR : **440/SK- 343 /Dinkes/2022**
TANGGAL : **4 Januari 2022**
TENTANG : **TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP) TAHUN 2022 DINAS KESEHATAN KOTA CIMAHI**

URAIAN TUGAS

- I. Penanggung jawab** : Bertanggungjawab atas kegiatan pelaksanaan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun Anggaran 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- II. Ketua** :
1. Memimpin, Mengkoordinasikan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
 2. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut;
 3. Bertanggungjawab atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- III. Sekretaris** :
1. Menganalisis data hasil evaluasi program dan kegiatan pada tahun anggaran 2022;
 2. Menyajikan hasil analisis data capaian program dan kegiatan;
 3. Menyusun dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.
- IV. Anggota**
1. Menghimpun data hasil capaian pelaksanaan program dan kegiatan;
 2. Melakukan verifikasi terhadap hasil analisis dan capaian kinerja;

3. Mengevaluasi data hasil verifikasi dan validasi sebagai bahan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi;
4. Membantu penyusunan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2022 Dinas Kesehatan Kota Cimahi.



**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA CIMAHI,**

drg. PRATIWI, M. Kes
Pembina Utama Muda/ IV c
NIP. 196206191989012001